BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemimpin dan kepemimpinan adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, karena berperan sangat sentral dalam hal organisasi. Pemimpin dengan kepemimpinan seseorang merupakan penentu arah maju atau mundurnya suatu organisasi atau dengan arah jauhnya yaitu penentu jatuh atau bangunnya suatu negara. Ada beberapa hal yang mengcakup dalam kepemimpinan yaitu perilaku perintah, memberi dukungan, berkomunikasi dan memberikan pengawasan.

Menurut Griffin dalam kepemimpinan dibagi dalam dua konsep, yaitu sebagai proses dan sebagai atribut. Sebagai proses yaitu seorang pemimpin dilihat dari jiwa kepemimpinannya terhadap apa yang dilakukan serta pengaruhnya terhadap pegawai atau bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi atau instansi. Adapun sebagai atribut yaitu jiwa kepemimpinan merupakan kumpulan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dikatakan pemimpin yang baik yaitu pemimpin yang telah berhasil dalam menentukan arah organisasi atau lembaganya. (Husaini, 2009)

Pemimpin merupakan panutan bagi masyarakat nya. Seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab yang besar, dapat dipercaya oleh masyarakat, dan lebih mementingkan nasib masyarakat daripada pribadi atau golongan. Seorang pemimpin yang sudah memiliki gagasan positif dan tau arah kedepannya bagi

kepentingan masyarakat merupakan faktor yang penting yang harus terus dimiliki oleh seorang pemimpin.

Seorang pemimpin harus memiliki fungsi menjadi penggerak, dinamisator yang telah disiapkan oleh sekumpulan manusia yang berorganisasi. Dalam hal berorganisasi maka perlu adanya kegiatan, sehingga diperlukan juga adanya pembagian tugas, cara kerja, dan hubungan pekerjaan yang satu dengan yang lainnya yakni dikendalikan oleh seorang pemimpin. Maka dari itu, seorang pemimpin harus dapat mempengaruhi orang lain agar tujuan yang telah direncanakan akan berjalan dengan lancar.

Seorang pemimpin pasti memiliki gaya kepemimpinan untuk mempengaruhi, mengarahkan, serta memotivasi orang lain demi tercapainya tujuan bersama. Gaya kepemimpinan setiap pemimpin pasti memiliki perbedaan yakni tergantung pada konteks, tantangan, dan karakteristik pada organisasi didalamnya. Gaya kepemimpinan tidak hanya terlihat secara eksternal saja, namun dapat mencerminkan nilai-nilai, sikap dan prinsip-prinsip seorang pemimpin dalam mengelola dan mengarahkan.

Kepemimpinan perempuan selalu diperbincangkan oleh semua kalangan. Perbincangan tersebut selalu berpihak pada pro dan ada yang kontra. Tidak sedikit para pemimpin perempuan mengalami peningkatan prestasi di lembaga yang dipimpinnya. Menurut ibu Woro Srihastuti selaku Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko mengatakan bahwasannya kepemimpinan perempuan di sektor publik itu sangat penting karena memiliki tugas

untuk menyusun kebijakan pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan adil untuk semua. (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2024)

Desa merupakan unit terendah dalam struktur administrasi negara. Secara tradisional desa merupakan komunitas kecil yang terdiri dari jumlah penduduk yang tinggal dalam wilayah geografis terbatas. Adanya wilayah desa ini yakni berperan untuk menyediakan layanan dasar dan mengambil keputusan lokal yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Desa juga memiliki fungsi yaitu sebagai forum partisipasi politik dan masyarakat dalam mengambil keputusan, yakni melalui lembaga pemerintah seperti dewan perwakilan desa atau organisasi keterwakilan lainnya.

Dalam struktur pemerintahan desa, posisi kepala desa memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan, pengambilan keputusan, serta pengelolaan sumber daya desa. Namun, hingga kini, kepemimpinan di tingkat desa masih didominasi oleh laki-laki. Representasi perempuan sebagai kepala desa masih sangat terbatas, baik secara kuantitas maupun dalam pengakuan kapasitasnya sebagai pemimpin. Padahal, perempuan memiliki potensi dan kemampuan yang sama untuk memimpin dan mengelola roda pemerintahan desa. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan gender dalam struktur kekuasaan lokal. Perempuan yang terpilih menjadi kepala desa kerap menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat kultural, struktural, maupun sosial. Stigma bahwa perempuan kurang layak memimpin, minimnya dukungan politik, serta terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan kepemimpinan menjadi penghambat

partisipasi perempuan dalam politik desa. Padahal, kehadiran perempuan dalam posisi strategis seperti kepala desa diyakini mampu membawa perspektif yang lebih inklusif, terutama dalam isu-isu sosial, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.

Fenomena ini sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu dari 17 tujuan SDGs, yaitu poin ke-5 tentang kesetaraan gender, secara eksplisit menekankan pentingnya memberikan akses dan peluang yang sama bagi perempuan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik dan pengambilan keputusan di semua tingkatan. SDGs tidak hanya menuntut penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam kepemimpinan untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Setiap desa pasti memiliki kepala desa, baik itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kepala desa ini bertanggung jawab untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan di desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yakni mencakup dalam hal pengelolaan pemerintah desa, perumusan kebijakan, dan pemantauan penggunaan sumber daya dan anggaran desa. Selain itu, kepala desa juga mempunyai peran dalam mengkoordinir dan menggerakan sumber daya untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, saluran irigasi, dan fasilitas fisik. (Syafitri et al., 2024)

Tabel 1. 1 Statistik Jumlah Kepala Desa Berdasarkan Jenis Kelamin

Wilayah Administrasi	Jenis Kelamin		Jumlah
,	Laki-Laki	Perempuan	
Indonesia	72.572 orang	5.385 orang	77.957 orang
Provinsi Jawa Barat	5.343 orang	424 orang	5.957 orang
Kabupaten Tasikmalaya	342 orang	9 orang	351 orang
Kecamatan Singaparna	9 orang	1 orang	10 orang

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Dilihat dari tabel diatas menurut data Badan Pusat Statistik dalam pendataan Potensi Desa (Podes) menunjukan bahwasannya jumlah kepala desa perempuan belum seimbang masih terlihat jauh perbedaanya. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu budaya patriarki masih mengakar di negara Indonesia. Sebagian orang menganggap bahwasannya kebijakan-kebijakan yang lahir yakni hasil dari gaya kepemimpinan seorang laki-laki, padahal perempuan pun dapat melahirkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan gaya kepemimpinan yang dimilikinya. (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024)

Desa Sukaherang berada di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Desa Sukaherang merupakan salah satu desa dari 10 desa yang berada di Kecamatan Singaparna yang dipimpin oleh seorang perempuan. Desa Sukaherang pun merupakan desa terluas ke empat di Kecamatan Singaparna. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya seorang pemimpin yang dapat mengembangkan desa nya agar lebih baik dari sebelumnya.

Untuk saat ini Desa Sukaherang dipimpin oleh Euis Rukoyah yakni Kepala desa dengan masa jabatan 2024-2032. Beliau merupakan kepala desa perempuan pertama yang dipilih oleh masyarakat Desa Sukaherang melalui Pilkades, dengan perolehan suara yang terbilang cukup banyak. Masyarakat percaya apabila Desa Sukaherang dipimpin oleh beliau maka akan maju. Karena masyarakat melihat sosok Ibu Kepala desa itu merupakan tokoh pemimpin yang patut dicontoh yakni dilihat dari pengalaman beliau yang pernah menjadi kepala sekolah SDN 1 Citatah dan pengawas UPTD Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

Kepala desa memiliki peranan penting dalam perkembangan desanya. Suatu desa dengan pemimpin yang berkualitas akan menghasilkan program-program kerja yang berkualitas pula. Pada kesempatan ini, peneliti tertarik dengan meneliti suatu desa yang dipimpin pertama kali oleh seorang perempuan yakni di Desa Sukaherang Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Terlebih kepala desa tersebut merupakan satu-satu nya kepala desa perempuan di Kecamatan Singaparna. Peneliti ingin lebih jauh meneliti bagaimana gaya kepemimpinan yang digunakan oleh beliau dalam memimpin Desa Sukaherang. Oleh karena itu, peneliti menggunakan judul "Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan di Desa Sukaherang Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, muncul pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa perempuan di Desa Sukaherang Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dalam menjalankan pemerintah desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa perempuan dalam menjalankan pemerintah desa Sukaherang sehingga dapat berpengaruh terhadap program kerja dalam pembangunan desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis yakni untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai gaya kepemimpinan yang digunakan oleh seorang perempuan sehingga dapat membuat kebijakan-kebijakan atau program kerja yang dapat memajukan masyarakat nya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis yakni ditujukan untuk pemerintah desa dan juga untuk masyarakat. Untuk pemerintah desa yaitu sebagai masukan perempuan layak dan bisa dalam memimpin sebuah instansi pemerintahan. Dan untuk masyarakat yaitu sebagai kajian untuk mengkritisi bahwa perempuan bisa bekerja di ranah pemerintahan.